

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya zaman maka semakin kompleks pula masalah yang dihadapi oleh negara. Negara Indonesia merupakan negara yang luas. Peningkatan jumlah penduduk di Indonesia berdampak kepada pendidikan, kemiskinan, pengangguran, dan aspek-aspek lainnya yang mengakibatkan tingkat kriminalitas juga akan meningkat. Hal tersebut disebabkan oleh ekonomi yang sulit, pendidikan rendah, dan bertambahnya jumlah pengangguran, sehingga banyak orang yang menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang mana cara tersebut melanggar hukum (Wirzahayati et al., 2023).

Berdasarkan Pancasila, Negara Republik Indonesia memiliki tujuan untuk membentuk masyarakat yang adil dan makmur. Negara Republik Indonesia dalam mencapai tujuannya ditemukan banyak rintangan serta hambatan yang ditimbulkan oleh para pelanggar hukum. Para pelanggar hukum tersebut kemudian ditangkap, diadili, dan dimasukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dengan memasukan para pelanggar hukum ke Lembaga Pemasyarakatan, tugas negara bukan berarti sudah selesai. Narapidana harus dibina serta dibimbing karena dikemudian hari mereka harus dikembalikan lagi kepada masyarakat (Hidayat, 2011).

Lembaga Pemasyarakatan atau biasa disebut Lapas, merupakan salah satu institusi dari subsistem peradilan pidana yang memiliki fungsi strategis yaitu sebagai pelaksanaan pidana penjara sekaligus menjadi tempat pembinaan bagi narapidana. Terdapat tujuan pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2022 tentang pemasyarakatan yaitu memberikan haluan penegasan pengaturan mengenai hak dan kewajiban bagi tahanan, anak, dan Warga Binaan (Suryaden, 2022). Pengaturan ini menyangkut dengan penyelenggaraan dan pemberian program pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, serta pelaksanaan perawatan, pengamanan, dan pengamatan.

Dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia, terdapat pasal 7 Nomor 31 tahun 1999 yang mana dalam pasal tersebut mengatur mengenai pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa pembinaan narapidana dijalani melalui beberapa tahap yang terstruktur. Adapun tahap pembinaan itu terdiri dari tiga tahap utama yaitu tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir. Proses pengalihan narapidana dari satu tahap ke tahap berikutnya sangat bergantung pada keputusan yang diambil dalam sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan. Keputusan tersebut didasarkan kepada data yang sudah dikumpulkan dari berbagai sumber seperti pembina pemasyarakatan, pembimbing kemasyarakatan, dan wali narapidana. Adapun data ini mencakup hasil pengamatan dari bagaimana perkembangan narapidana dan penilaian terhadap kemajuan narapidana selama menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Dengan adanya tahap pembinaan yang terstruktur dan pengambilan keputusan yang didasarkan pada data yang obyektif ini, diharapkan sistem pembinaan narapidana di Indonesia diatur dengan cermat untuk memberikan peluang yang adil dan berkelanjutan bagi narapidana agar bisa mendapatkan manfaat yang maksimal dari program pembinaan dan diharapkan dapat berhasil dalam reintegrasi ke masyarakat setelah masa tahanan mereka berakhir (Yudiana et al., 2019).

Dalam sistem pemasyarakatan terdapat tujuan dari pemidanaan itu sendiri, adapun tujuannya yaitu memberikan pembinaan dan bimbingan dengan tahap-tahap atau orientasi serta pembinaan asimilasi. Pada proses pembinaan ini narapidana tentunya dibina serta dibimbing agar dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana kembali. Sedangkan pada tahap asimilasi narapidana diasimilasikan ke tengah-tengah masyarakat diluar Lembaga Pemasyarakatan. Hal tersebut ditujukan untuk memberikan bekal kepada narapidana agar ketika sudah keluar dari Lapas mereka tidak lagi merasa canggung dengan masyarakat di sekitar. Pembinaan narapidana ini memiliki program bimbingan yang mana bimbingannya berupa kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian ini diarahkan pada pembinaan mental serta watak agar narapidana bisa menjadi manusia seutuhnya yang bertanggung jawab terhadap diri sendiri, keluarga, serta masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian ini diarahkan kepada pembinaan bakat dan keterampilan agar narapidana ketika dikembalikan kepada masyarakat dapat menjadi anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab (Tamami, 2020).

Keberhasilan atau kegagalan tugas negara dalam pembinaan narapidana sangat bergantung pada kemampuan Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan pembinaan. Maka dari itu dalam pembinaan terhadap Warga Binaan ini dibutuhkan strategi dari pihak Lembaga Pemasyarakatan agar bisa membentuk karakter Warga Binaan menjadi lebih baik lagi setelah nantinya bebas dari masa tahanannya. Indonesia mengatur strategi pembinaan narapidana melalui sistem yang dikenal sebagai sistem pemasyarakatan. Sistem ini telah menjadi bagian

integral dari penegakan hukum sejak tahun 1964. Tujuan dari sistem pemasyarakatan ini diatur dalam pasal Undang-Undang Pasal 2 nomor 12 Tahun 1995 yang menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan nya, memperbaiki diri, dan tidak mengulang tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab (Subroto & Al Akbar, 2021).

Namun pada kenyataannya tidak semua Lembaga Pemasyarakatan dapat melaksanakan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan secara maksimal. Seperti yang dijelaskan oleh Dina Wirzahayati, Asril, dan Rudiadi (2023) pada penelitiannya yang berjudul “Pelaksanaan Pembinaan Narapidana pada Lapas *Medium Security* di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi” di mana pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa jumlah narapidana residivis (pengulangan tindak pidana) terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, pada tahun 2022 terdapat 102 orang residivis, 2023 sebanyak 122, dan terakhir pada tahun 2024 sebanyak 118 orang. Hal tersebut disebabkan oleh terjadinya ketidakseimbangan antara petugas pembinaan dengan jumlah Warga Binaan pemasyarakatan di Lapas tersebut. Selain itu tenaga ahli di bidang pembinaan juga tidak dibekali dengan ilmu khusus. Faktor lainnya yaitu terkendala pada sarana dan prasarana di Lapas yang kurang memadai dan terbatas.

Permasalahan lainnya juga ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Anny Yuserlina (2021) dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Pembinaan terhadap

Narapidana Pengedar Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Payakumbuh”. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa terdapat hambatan dalam melakukan pembinaan seperti kurangnya SDM petugas yang bertanggung jawab dalam melakukan pembinaan. *Overload* atau berlebihnya penghuni Lapas yang standarnya hanya 59 orang tetapi pada saat itu jumlah Warga Binaan mencapai 300 orang sehingga masalah tersebut menjadi hambatan dalam melakukan pembinaan. Pihak Lapas mengalami permasalahan terkait kurangnya dana anggaran untuk melengkapi sarana dan prasarana pembinaan terhadap narapidana. Pembinaan yang dilakukan kepada narapidana juga belum merata disebabkan oleh urusan administratif yang terlalu banyak.

Sumatera Barat memiliki beberapa Lembaga Pemasyarakatan dengan klasifikasi penempatan yang sama yaitu tingkat kejahatan, rentang umur, dan jenis kelamin yang sama (laki-laki). Diantaranya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Padang, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Payakumbuh, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi, dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pariaman. Pada dasarnya Lembaga Pemasyarakatan tersebut juga menyediakan pembinaan baik pembinaan kepribadian maupun kemandirian. Tetapi ditemukan tidak semua Lembaga Pemasyarakatan memiliki program pembinaan yang sama. Hal tersebut disebabkan oleh setiap Lembaga Pemasyarakatan diberikan kebebasan dalam menentukan jenis pembinaan. Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan tersebut sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Jenis Pembinaan di Beberapa Lembaga Pemasyarakatan di Sumatera Barat

No	Lokasi	Jenis Pembinaan	
		Kepribadian	Kemandirian
1.	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Padang	<ul style="list-style-type: none"> - Santri madani - Kerohanian - Rehabilitasi medis dan sosial - Olahraga dan kesenian - Kepramukaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan sendal hotel, <i>bakery</i>, anyaman lidi sawit. - Pertukangan kayu, pangkas rambut, laundry, reparasi sofa. - Perkebunan dan perikanan
2.	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Payakumbuh	<ul style="list-style-type: none"> - Keagamaan - Olahraga dan kesenian - Pembinaan intelektual 	<ul style="list-style-type: none"> - Memasak - Menjahit - Perkebunan Hidroponik
3.	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi	<ul style="list-style-type: none"> - Kerohanian - Kesadaran hukum 	<ul style="list-style-type: none"> - Kursus otomotif - Kursus sablon - Pelaksanaan rutin bimbingan kerja
4.	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pariaman	<ul style="list-style-type: none"> - Kerohanian - Santri - Bimbingan konseling - Pramuka 	<ul style="list-style-type: none"> - Tanaman hidroponik - Pengelasan - Perkebunan

Sumber: Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat 2023

Dari data di atas terlihat bahwa tidak semua Lembaga Pemasyarakatan memiliki program pembinaan yang sama. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Padang memiliki program pembinaan unggulan yaitu pembinaan santri madani serta rehabilitasi medis dan sosial. Sedangkan Lembaga Pemasyarakatan lainnya hanya berfokus kepada pembinaan kerohanian dan tidak memiliki pembinaan rehabilitasi medis dan sosial. Dengan kata lain di antara Warga Binaan kasus narkoba tidak terdapat pembinaan khusus di Lembaga Pemasyarakatan lainnya. Sedangkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Padang memberikan pembinaan khusus bagi para Warga Binaan kasus narkoba, yaitu pembinaan rehabilitasi medis dan sosial. Selain itu Lembaga Pemasyarakatan Kelas

IIA Kota Padang juga memiliki program unggulan di bidang kemandirian yaitu pembuatan sandal hotel, *bakery*, anyaman lidi sawit, dan pertukangan kayu yang juga sudah bekerja sama dengan pihak ketiga untuk mendistribusikan hasil dari program tersebut.

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kota Padang merupakan institusi yang menindaklanjuti para tahanannya dengan cara membekali baik dalam hal kepribadian maupun kemandirian untuk bekal para tahanan tersebut ketika masa tahanannya sudah selesai dan dikembalikan kepada masyarakat. Tiga tahun belakang, Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kota Padang mengalami penurunan jumlah Warga Binaan residivis di mana beberapa Lapas lain justru mengalami peningkatan jumlah WBP residivis. Adapun perbandingan jumlah Warga Binaan residivis di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kota Padang dengan beberapa Lapas lainnya sebagai berikut:

Tabel 1. 2
Jumlah Warga Binaan Tahun 2022-2024

No	Tahun	Jumlah WBP	
		Non Residivis	Residivis
1.	2022	1027	286
2.	2023	1042	248
3.	2024	976	228

Sumber: Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat 2024

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kota Padang berhasil dalam membina Warga Binaannya baik dalam pembinaan kepribadian maupun kemandirian. Hal tersebut dibuktikan dengan berkurangnya jumlah Warga Binaan Pemasarakatan residivis dari tahun 2022

hingga 2024. Dari hasil wawancara dengan KASUBSI bagian pembinaan kepribadian, berkurangnya Warga Binaan Pemasyarakatan residivis di Lapas tersebut merupakan bentuk keberhasilan Lapas dalam membina Warga Binaan sebab Lembaga Pemasyarakatan telah berhasil membuat program-program pembinaan yang dapat merubah Warga Binaan menjadi pribadi yang lebih baik lagi.

Terdapat beberapa hal menarik bagi peneliti mengenai penelitian ini. Pertama, penelitian ini belum pernah dilakukan dengan perspektif ilmu sosiologi. Kedua, penelitian mengenai strategi pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Padang juga belum pernah dilakukan. Ketiga, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Padang memiliki beragam program unggulan pembinaan baik di bidang kepribadian maupun kemandirian. Keempat, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Padang juga mampu membuktikan bahwa program serta strategi yang dirancang untuk membina Warga Binaannya mampu merubah Warga Binaan menjadi lebih baik lagi dengan bukti keberhasilannya yaitu berkurangnya jumlah Warga Binaan dalam kurun tiga tahun kebelakang. Hal ini merupakan suatu fenomena yang menarik untuk dikaji lebih dalam lagi.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini menarik disebabkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Padang merupakan Lembaga Pemasyarakatan terbesar di Sumatera Barat. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Padang juga menjadi Lembaga Pemasyarakatan dengan jumlah Warga Binaan terbanyak di Sumatera Barat dengan tingkat jumlah narapidana residivis berkurang dalam kurun waktu tiga tahun

kebelakang, hal ini disebabkan oleh Lapas ini banyak mendapatkan kiriman Warga Binaan dari luar kota Padang. Warga Binaan kiriman tersebut dipindahkan ke Lapas ini dengan tujuan dapat menjadikan Warga Binaan tersebut menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Selain itu Warga Binaan dipindahkan juga disebabkan oleh di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Padang ini memiliki banyak program pembinaan unggulan.

Adanya Lembaga Pemasyarakatan tentunya dapat dijadikan tempat kepada para pelaku tindakan kriminal untuk dapat memperbaiki perilakunya. Lembaga Pemasyarakatan juga ditugaskan untuk dapat melakukan upaya preventif kepada para Warga Binaan agar bisa meyakinkan dirinya untuk tidak lagi melakukan tindak kejahatan lagi. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan lainnya yaitu sebagai tempat para pelaku kejahatan untuk menebus kesalahan yang sudah diperbuat dengan mengoreksi diri dan sebagai tempat rehabilitasi dengan memperoleh pembinaan agar ketika nantinya Warga Binaan dikembalikan ke tengah masyarakat dapat menjalani kembali kehidupan nya dengan baik.

Berdasarkan uraian di atas untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Padang dalam membina para Warga Binaan, maka muncul rumusan masalah yaitu **“Bagaimana strategi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Padang dalam pembinaan narapidana?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas dari latar belakang dan rumusan masalah yang sudah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan tujuan dari penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan strategi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Padang dalam pembinaan terhadap narapidana di Lapas tersebut.

2. Tujuan Khusus

Untuk mencapai tujuan umum di atas maka perlu dirumuskan pula tujuan khusus dari penelitian ini, adapun tujuan khusus penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Mengetahui strategi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Padang dalam melakukan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas tersebut.
- 2) Mengetahui faktor penghambat serta pendukung Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Padang dalam melakukan pembinaan terhadap Warga Binaan di Lapas tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Hasil dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan disiplin ilmu sosial khususnya di bidang sosiologi. Selain itu dengan dilakukannya penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan menambah wawasan pengetahuan terutama untuk mahasiswa ataupun khalayak umum dan untuk bahan evaluasi bagi Lembaga Pemasyarakatan terkhusus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Padang.

2. Manfaat Praktis

- 1) Sebagai masukan untuk Lembaga Pemasyarakatan terkhusus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Padang dalam melaksanakan peranannya sebagai Lembaga yang memberikan pembinaan terhadap Warga Binaan.
- 2) Sebagai bahan masukan untuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat secara sadar mau mengikuti segala proses pembinaan sehingga setelah dikembalikan ke masyarakat mereka dapat mengaplikasikan apa yang sudah mereka dapatkan ketika mereka berada di Lapas dengan baik dan dapat diterima dengan baik juga oleh lingkungan nya.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Konsep Strategi

Kata strategi berasal dari Bahasa Yunani yaitu *strategos*, yang pada awalnya diartikan sebagai usaha untuk mencapai kemenangan dalam konteks perang. Meskipun istilah ini pertama kali digunakan di lingkungan militer, seiring berjalannya waktu, konsep strategi ini merambah ke berbagai bidang lain dengan esensi yang cenderung sama. Strategi adalah suatu upaya yang dilakukan dengan hati-hati dalam perencanaan tindakan yang bertujuan untuk mengembangkan keunggulan bersaing perusahaan dan pada saat yang sama mengkonsolidasikannya. Bagi setiap perusahaan, pencarian ini adalah suatu proses berkesinambungan yang dimulai dengan kesadaran tentang posisi mereka saat ini dan aset yang mereka miliki. Dengan pendekatan yang terencana dan matang, strategi memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi tujuan jangka panjang, mengukur kemajuan,

serta menciptakan rencana tindakan yang tepat untuk mencapai dan mempertahankan keunggulan bersaing dalam lingkungan bisnis yang selalu berubah (Wirawan, 2017).

Strategi merupakan suatu tindakan yang memiliki dampak signifikan dan merupakan faktor penentu dalam menentukan keberhasilan suatu program atau kegiatan, baik yang masih dalam tahap perencanaan maupun yang telah dijalankan oleh pihak manajemen. Dalam konteks ini, strategi mencakup serangkaian langkah dan rencana yang didesain secara cermat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi tidak hanya menentukan arah, tetapi juga memastikan alokasi sumber daya yang efisien, pengambilan keputusan yang tepat, dan adaptasi yang diperlukan dalam menghadapi perubahan dan tantangan yang mungkin timbul selama pelaksanaan program atau kegiatan. Oleh karena itu, strategi memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin kesuksesan dan efektivitas dalam mencapai hasil yang diinginkan (Abdussamad & Amala, 2016).

Penetapan strategi pada dasarnya bertujuan untuk memastikan bahwa proses pengambilan keputusan dalam suatu organisasi dilakukan dengan cara yang terencana dan terstruktur (Giswanti, 2018). Ini mengacu pada langkah-langkah yang matang dalam merancang rencana aksi yang selaras dengan kemampuan serta kesepakatan bersama dalam organisasi. Dengan demikian, strategi menjadi suatu pedoman yang esensial bagi organisasi, memungkinkan mereka untuk menjalankan kegiatan secara efektif. Selain itu strategi juga memungkinkan perencanaan taktis yang sesuai dengan tujuan jangka panjang. Dengan demikian, strategi bukan hanya

sekedar dokumen tertulis, tetapi juga alat yang aktif untuk mencapai kesuksesan dan konsistensi dalam pencapaian tujuan organisasi (Siagian, 2008)

Strategi sosial, pada dasarnya merupakan metode atau pendekatan yang digunakan oleh individu atau kelompok dalam mencapai tujuan tertentu. Konsep strategi sosial mencakup serangkaian tindakan yang diambil baik secara individu maupun bersama-sama oleh masyarakat dalam rangka menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, strategi sosial menggambarkan upaya yang dilakukan untuk berpartisipasi, bertindak, dan mencapai hasil yang diinginkan dalam berbagai aspek kehidupan (Indraddin & Irwan, 2016).

1.5.2 Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Landasan hukum keberadaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 khususnya pada pasal 1 angka 3 yang menjelaskan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang biasa disingkat Lapas adalah tempat pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan (Rahmat et al., 2021). Dalam kaitannya dengan operasional sehari-hari, Lembaga Pemasyarakatan sudah pasti terdapat peraturan yang mengatur tata cara pelaksanaan pembinaan warga binaan pemasyarakatan dan peserta didik. Aturan itu disebut dengan Sistem Pemasyarakatan yang dijelaskan dalam Undang-Undang yang sama yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 pasal 1 angka 2 yang tertulis “Sistem Pemasyarakatan merupakan suatu kerangka yang mengatur tentang bagaimana pembinaan warga binaan harus dilaksanakan, dengan tujuan agar mereka menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana. Dengan demikian diharapkan mereka dapat diterima kembali oleh

masyarakat, berperan aktif dalam pembangunan, dan menjalani kehidupan yang layak sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab” (Situmorang, 2019)

Setelah sebelumnya berada di bawah naungan Departemen Kehakiman, Lembaga Pemasyarakatan sekarang berfungsi sebagai Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM. Doktor Sahardjo, Menteri Kehakiman saat itu membuat gagasan Lembaga Pemasyarakatan juga dikenal sebagai Lapas, pada tahun 1962. Gagasan ini muncul sebagai upaya Doktor Sahardjo untuk mengubah fungsi rumah penjara, yang sebelumnya hanya berfokus pada pemidanaan, menjadi tempat yang lebih berfokus pada pendidikan dan pembinaan narapidana. Ini didasarkan pada keyakinan bahwa metode ini akan memberi narapidana kesempatan untuk memperbaiki diri dan mempersiapkan diri sehingga mereka dapat kembali ke masyarakat dengan keterampilan dan pengetahuan yang mereka butuhkan untuk menjadi warga masyarakat yang lebih baik dan produktif setelah menjalani hukuman (Ryanto, 2021).

Dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah suatu lembaga atau organisasi yang mengatur sekelompok orang sebagai kelompok sosial dengan batasan tertentu. Lembaga Pemasyarakatan secara khusus disebut sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk membina sekelompok masyarakat atas perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, dengan asumsi bahwa proses pembinaan lembaga tersebut akan membawa perubahan yang diharapkan dari Warga Binaan tersebut.

Lembaga Pemasyarakatan memiliki fungsi yang tertuang dalam Pasal 3 Keputusan Menteri Republik Indonesia No. M.01.PR.07.03 Tahun 1985 yang berisi

tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan untuk menyelesaikan tugasnya memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Melakukan pembinaan narapidana/anak didik.
2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja.
3. Melakukan bimbingan sosial/kerohanian narapidana/anak didik.
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan.
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

1.5.3 Konsep Pembinaan Narapidana

Pembinaan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah suatu rangkaian tindakan, upaya, dan kegiatan yang dilakukan dengan efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang lebih baik. Melalui pemanfaatan kemampuan seseorang, pembinaan bertujuan untuk membantu orang lain yang sedang mengalami proses belajar atau pengembangan diri. Dengan dilakukannya pembinaan, seseorang dapat diberikan bimbingan dan dukungan yang diperlukan untuk memperbaiki dan meningkatkan pengetahuan mereka, sehingga mereka dapat mencapai tujuan hidup yang diinginkan (Mangunhadjana, 1991).

Lembaga Pemasyarakatan juga merupakan tempat untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi para Warga Binaan yang telah melahirkan suatu sistem pembinaan lebih dari 30 tahun yang dinamakan dengan sistem pemasyarakatan (Rahmat, 2018). Pada tahun 1964, terjadi perubahan besar dalam tujuan pembinaan narapidana. Ini membuat sistem pemasyarakatan, atau pembinaan narapidana, mengalami perkembangan besar. Perubahan ini diprakarsai oleh Suhardjo dan

terjadi selama Konferensi Dinas Kependidikan di Lembang. Pada saat itu, perubahan tersebut mendorong pergeseran ke arah sistem pemasyarakatan daripada sistem kependidikan yang lebih berfokus pada pemidanaan. Metode ini menurut Suhardjo lebih bergantung pada kebutuhan untuk membangun fondasi yang kuat untuk pembinaan narapidana. Setelah sistem pemasyarakatan diterapkan, rehabilitasi dan perbaikan perilaku narapidana harus menjadi prioritas utama, sehingga mereka dapat kembali ke masyarakat dengan lebih siap dan produktif (Harsono, 1995).

Pembinaan narapidana atau sistem pemasyarakatan merupakan suatu struktur yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila untuk mengatur arah, batas, dan metode dalam membina warga binaan. Tujuan utama sistem ini adalah untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan sehingga mereka dapat memperbaiki diri, menyadari kesalahan yang telah mereka lakukan, dan menghindari melakukan kesalahan yang sama di masa depan. Hal ini ditujukan agar narapidana dapat diterima kembali oleh masyarakat dan menjadi bagian dari masyarakat. Metode tersebut sejalan dengan tujuan yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Pemasyarakatan, yaitu untuk mengubah Warga Binaan pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya. Dalam sistem pemasyarakatan, pembinaan adalah bagian penting dari proses ini karena melalui pembinaan diharapkan terjadi perubahan yang lebih baik untuk narapidana, sehingga mereka dapat kembali ke masyarakat sesuai dengan aturan dan norma yang ada, serta sapat berkontribusi positif dalam berkehidupan di tengah masyarakat (Ryanto, 2021).

1.5.4 Tinjauan Sosiologis

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori struktural fungsional oleh Talcott Parsons. Teori ini menjelaskan bahwa masyarakat merupakan sebuah sistem yang terintegrasi secara fungsional dalam bentuk keseimbangan. Teori struktural fungsional memandang bahwa realitas sosial merupakan sebuah hubungan sistem, yang mana sistem masyarakat yang berada dalam keseimbangan kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling bergantung. Ketika sistem atau struktur sosial mengalami perubahan, hal itu tentunya akan berpengaruh kepada perubahan di bagian lain dari masyarakat. Teori ini membahas tentang fungsi atau peran institusi sosial atau struktur sosial, baik itu struktur mikro, meso, ataupun makro asalkan mereka memiliki fungsi, serta mengamati tindakan sosial tertentu dalam suatu masyarakat dan pola hubungannya dengan komponen sosial lainnya. Tujuan utama teori struktural fungsional Talcott Parsons yaitu menciptakan keteraturan sosial dalam masyarakat yang akan berjalan dengan baik jika aktor-aktor yang terlibat mampu menjalankan fungsi dan struktur mereka dengan baik (Ritzer, 2011).

Parsons dalam teori struktural fungsional melihat bahwa kelakuan individu bukan suatu tindakan biologis, melainkan sebagai suatu tindakan yang memiliki makna yang berarti kelakuan individu senantiasa ditempatkan pada suatu kaitan sosial tertentu atau sebuah tindakan yang terstruktur. Hal tersebut menandakan bahwa perilaku individu ditempatkan dalam sistem yang terbagi menjadi subsistem seperti ekonomi, sosial, budaya, kepribadian maupun organisme tingkah laku. Tindakan yang dilakukan oleh individu tersebut dilandaskan dengan hukum sebagai

acuan dalam proses interaksi oleh sesama anggota nya. Dengan berjalannya proses dalam sistem tersebut akan menyebabkan perubahan dalam masyarakat, hal itu disebabkan oleh sistem berusaha untuk menjaga struktur nya (Rivai, 2012).

Teori struktural fungsional Parsons menjelaskan bahwa suatu fungsi sebagai kumpulan kegiatan yang ditujukan kearah pemenuhan kebutuhan tertentu atau kebutuhan sistem. Dari adanya definisi tersebut, Parsons memiliki fungsi penting yang dibutuhkan oleh semua sistem. Parsons menyebut fungsi tersebut dengan sebutan AGIL yang dijadikan sebagai sebuah fungsi, yaitu sekumpulan kegiatan yang ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan sistem. AGIL merupakan singkatan dari (A) *adaptation*, (G) *goals Attainment*, (I) *integration*, dan (L) *latency* (Ritzer, 2014). Suatu sistem yang dilakukan di masyarakat dapat berjalan dengan asumsi empat fungsi tersebut terpenuhi, adapun sebagai berikut:

1. *Adaptation* (adaptasi), sistem ini harus mampu mengatasi situasi yang mendesak. Sehingga sistem harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan dengan kebutuhan nya. Dengan kata lain sebuah sistem harus dapat bertahan ketika situasi di lingkungan luar mengalami perubahan.
2. *Goals Attainment* (pencapaian tujuan), dalam sistem ini harus dapat mengartikan serta mencapai tujuan utama serta masyarakat dengan cara kolektif berusaha untuk dapat meraih tujuan tersebut agar dapat terwujud. Setiap sistem harus mempunyai arah serta tujuan yang jelas agar tercapai suatu tujuan.

3. *Integration* (integrasi), sistem harus dapat mengatur antar hubungan bagian-bagian yang menjadi komponen. Integrasi merupakan pengatur hubungan bagian-bagian yang menjadi komponen agar dapat berfungsi dengan maksimal. Selain itu sistem juga wajib memberi regulasi dalam suatu hubungan dalam upaya membangun interlasi antar anggota dalam sistem tersebut.
4. *Latency* (pemeliharaan pola), pola yang sebelumnya sudah terbentuk harus dapat dipertahankan, diperbaiki, dan diperbaharui baik itu motivasi individual maupun pola kultural yang menciptakan dan menjaga agar motivasi tersebut tetap seimbang.

Teori struktural fungsional menjelaskan bahwa suatu sistem saling berhubungan satu sama lain. Sistem yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu kaitan yang sangat berhubungan antara Lembaga Pemasarakatan dengan Warga Binaan. Lembaga Pemasarakatan mempunyai tujuan yaitu untuk memberikan pembinaan, mengayomi, merawat, serta memperbaiki kepribadian para Warga Binaan dengan memberikan tahapan adaptasi terlebih dahulu ketika Warga Binaan tersebut akan menjalani masa tahanannya dengan melalui pembinaan di Lembaga Pemasarakatan. Adaptasi ini dibutuhkan agar Warga Binaan dan petugas Lembaga Pemasarakatan dapat bekerja sama dengan baik serta Warga Binaan dapat mengikuti segala macam kegiatan yang ada di dalam Lapas dengan baik. Didalam pembinaan tersebut juga terdapat regulasi-regulasi yang mengatur kegiatan pembinaan yang menjadi suatu kewajiban oleh Warga Binaan agar dapat melaksanakan kegiatan tersebut. Kegiatan yang terjadi di dalam Lembaga

Pemasyarakatan tentunya terdapat pengawasan langsung dari petugas Lapas. Pembinaan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan tentu memiliki *goals* atau tujuan yaitu supaya Warga Binaan dapat merasakan efek jera dan sadar bahwa perbuatan yang mereka lakukan sebelumnya itu salah dan melanggar hukum. Terlebih lagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Padang memiliki beberapa program unggulan baik di bidang kepribadian maupun kemandirian dengan tujuan yang berbeda-beda, sehingga dari adanya program unggulan tersebut diharapkan dapat membentuk pribadi yang berkualitas bagi Warga Binaan. Dalam berlangsungnya pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Padang tentu terdapat integrasi antara petugas Lapas dengan Warga Binaan, adapun integrasi tersebut yaitu petugas Lapas berbaur langsung dengan Warga Binaan. Hal tersebut dilakukan agar para Warga Binaan tidak merasa diasingkan. Selain itu dapat dilihat juga Warga Binaan yang saling menghargai serta memotivasi satu sama lain agar selalu semangat dalam mengikuti segala bentuk pembinaan. Integrasi ini juga dapat dilihat dalam pelaksanaan pembinaan yang tidak membedakan antara narapidana berstatus residivis dengan non residivis. *Latency* atau pemeliharaan pola juga harus diperhatikan supaya pembinaan yang berlangsung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Padang ini dapat berjalan secara kondusif dan optimal. Dengan adanya keempat fungsi tersebut maka Lembaga Pemasyarakatan sebagai Lembaga yang menampung orang-orang yang bertindak kriminal agar dapat memperbaiki kepribadian nya dan sistem yang sedang berjalan semakin maju. Maka dari itu teori struktural fungsional oleh Talcott Parsons akan digunakan sebagai pendekatan untuk membantu menjawab rumusan masalah pada penelitian ini.

1.5.5 Penelitian Relevan

Dalam sebuah penelitian sangat diperlukan dukungan dari penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian sebelumnya akan memberikan bahan perbandingan dan acuan untuk melaksanakan penelitian yang akan dilaksanakan. Dalam penelitian ini akan mencoba menghubungkannya dengan beberapa penelitian terdahulu terkait pembinaan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Dari hasil penelusuran terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan pembinaan Warga Binaan, diantaranya yaitu penelitian yang dilakukan oleh **Muh. Syafril (2022)** dengan judul “Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Pembinaan Nrapidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palopo). Pada penelitian ini berfokus pada pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kota Palopo dalam membina Warga Binaan yang terjerat kasus penyalahgunaan narkoba. Dari hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa Warga Binaan yang terjerat kasus penyalahgunaan narkoba lebih difokuskan kepada pembinaan kerohanian dengan cara melakukan rehabilitasi sosial didalam Lapas tersebut. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palopo bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) kota Palopo. Hal tersebut dilakukan supaya para pengguna narkoba menyadari bahwa betapa berbahayanya zat-zat yang terkandung didalam narkoba. Maka dari itu upaya yang dilakukan yaitu mengadakan pembinaan kerohanian dengan cara pendekatan porsional, pendekatan dari hati ke hati, serta pembinaan keagamaan agar para Warga Binan mendekatkan diri kepada Tuhan YME.

Penelitian lainnya yang relevan yaitu penelitian yang dilakukan oleh **Doris Rahmat, Santoso Budi NU, dan Widya Daniswara (2021)** yang berjudul “Fungsi Lembaga Pemasarakatan dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasarakatan”. Penelitian ini berfokus kepada bagaimana fungsi Lembaga Pemasarakatan dalam membina para Warga Binaannya. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu fungsi petugas Lembaga Pemasarakatan dalam membina narapidana di Lembaga Pemasarakatan adalah sebagai pembimbing dan sebagai pendidik, pekerja sosial, wali atau orang tua, pemeliharaan keamanan, dan sebagai komunikator dengan masyarakat guna mengatur supaya pembinaan tersebut dapat berjalan dengan cepat dan tepat menurut program yang telah ditetapkan. Penelitian ini juga membahas problem Lembaga Pemasarakatan dalam pembentukan karakter dan pribadi, di mana kurang berjalan nya pelaksanaan program pembinaan dengan baik, rendahnya minat narapidana dalam mengikuti program-program pembinaan, tenaga teknis pemasarakatan yang kurang memadai, rendah nya semangat para petugas dalam melaksanakan tugas nya, petugas yang kurang menguasai bidang nya, serta sarana dan prasarana yang kurang memadai.

Penelitian terakhir yaitu penelitian yang dilakukan oleh **Galang Resworo Aji (2022)** “Model Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Pencegahan Residivis di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Magelang”. Hasil penelitian ini yaitu model pembinaan narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kota Magelang pada dasarnya mengacu kepada putusan Menteri Kehakiman RI No. M. 02. PK. 04 tahun 1990 tentang pembinaan narapidana dan UU Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasarakatan. Pembinaan Warga Binaan meliputi pembinaan psikis, fisik, dan

pembinaan keterampilan. Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang dapat dikatakan sudah berjalan efektif. Hal tersebut dibuktikan dari menurunnya presentase residivis di Lembaga Pemasyarakatan tersebut. Pemenuhan peran Lapas Kelas IIA Magelang diupayakan melalui optimalisasi pembinaan narapidana melalui pemisahan narapidana kasus baru dengan narapidana residivis, pengelompokan pembinaan berdasarkan skill, serta mengintensifkan pembinaan keagamaan.

Dari penelitian di atas yang menjadi pembeda dengan penelitian ini yaitu fokus penelitian yang dilakukan mengarah kepada strategi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Padang dalam membina para Warga Binaan nya melalui program-program yang ada. Penelitian ini membahas tentang faktor penghambat serta faktor pendukung yang dialami dalam pembinaan Warga Binaan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan penelitian untuk menganalisis data dengan memberikan penjelasan yang sistematis, faktual, dan akurat dari suatu kejadian. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan penelitian kualitatif. Data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif biasanya berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan manusia tanpa berusaha mengangkakannya (Afrizal, 2014).

Penelitian kualitatif berfokus pada deskripsi yang mendalam tentang kondisi dalam lingkungan alami atau natural. Dengan demikian, penelitian kualitatif berusaha untuk merekam dan memahami apa yang terjadi di lapangan

studi tanpa berusaha untuk mengubah kondisi tersebut yang memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi realitas sosial, budaya, dan fenomena yang terjadi. Sehingga nantinya dapat menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam (Nugrahani, 2014).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai strategi Lembaga Pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana maka peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dirasa sangat tepat untuk menjawab masalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu tipe penelitian deskriptif. Tipe penelitian deskriptif berupaya menggambarkan suatu fenomena atau kejadian yang terjadi di lapangan serta data yang diperoleh yaitu berupa kata-kata lisan maupun tulisan dari perilaku orang yang diamati. Dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif, penelitian ini dapat mengungkap suatu proses kejadian secara mendalam. Peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif karena peneliti menganalisis dan mengumpulkan data yang berupa kata-kata (tulisan maupun lisan) serta mengamati secara mendalam terkait peran dan upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Padang dalam membina Warga Binaan yang ada di dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut.

1.6.2 Informan Penelitian

Dalam sebuah penelitian, peneliti tentunya membutuhkan informan. Informan penelitian merupakan individu yang berperan dalam menyediakan informasi yang relevan kepada peneliti. Informan penelitian dapat memberikan data dan wawasan tentang diri mereka sendiri, orang lain, kejadian tertentu, atau topik

penelitian. Informan penelitian memiliki peran penting dalam penelitian kualitatif karena mereka dapat memberikan perspektif dan konteks yang mendalam, hal tersebut dapat membantu peneliti untuk memahami fenomena atau peristiwa yang sedang diteliti (Afrizal, 2014).

Teknik menentukan informan yang digunakan pada penelitian ini yaitu teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik yang digunakan oleh peneliti jika terdapat pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam proses pengambilan sampel (Sugiyono, 2021). Pada penelitian ini, peneliti memilih sampel sebagai sumber data penelitian yaitu Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kota Padang. Dengan pertimbangan tersebut peneliti dapat memperoleh data yang maksimal untuk mendeskripsikan data.

Menurut Afrizal (2014) terdapat 2 kategori informan penelitian dalam penelitian kualitatif, yaitu:

1. Informan pelaku: informan pelaku merupakan informan yang memberikan keterangan tentang pikiran, perbuatan, interpretasi, dan tentang pengetahuannya. Informan pelaku merupakan subjek penelitian itu sendiri. Informan pelaku pada penelitian ini yaitu petugas pemasarakatan yang terlibat langsung dalam pembinaan pada warga binaan di Lembaga Pemasarakatan kelas IIA Kota Padang. Kriteria informan pelaku yang dijadikan informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembinaan kepribadian dan

perawatan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Padang.

2) Kepala Seksi Kegiatan Kerja selaku yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembinaan di bidang kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Padang.

3) Kepala Seksi Pembinaan Anak Didik yang bertanggung jawab atas seluruh pembinaan terhadap Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Padang.

2. Informan pengamat: informan pengamat merupakan informan yang memberikan informasi tentang orang lain ataupun suatu kejadian kepada peneliti. Informan pengamat merupakan orang yang mengetahui tentang orang atau kejadian yang sedang diteliti. Informan pengamat pada penelitian ini yaitu Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA yang mendapatkan pembinaan dari Lembaga Pemasyarakatan tersebut dengan kriteria sebagai berikut:

1) Warga Binaan Pemasyarakatan yang masih dalam masa tahanan dan masih mengikuti pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Padang.

2) Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Padang yang sudah lepas dari masa tahanan. Dengan adanya informan ini diharapkan dapat menjadi bukti bahwa strategi atau program-program yang dilakukan oleh Lapas tersebut berjalan

sebagaimana mestinya dan bisa dirasakan langsung oleh mantan Warga Binaan Pemasyarakatan.

- 3) Pihak ketiga yang bekerja sama dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Padang. Dengan adanya informan ini diharapkan dapat dijadikan triangulasi data dari pihak lain yang dapat menyempurnakan keabsahan data.
- 4) Keluarga WBP. Dengan adanya informan ini diharapkan dapat dijadikan triangulasi data dari pihak keluarga tentang bagaimana perubahan yang terjadi oleh WBP setelah melakukan pembinaan di Lapas. Selain itu dengan adanya informan ini juga dapat mengetahui bagaimana peran Lapas dalam menjaga hubungan antara WBP dengan keluarga.



Tabel 1. 3
Identitas Informan

No	Nama	Umur	Jenis Kelamin	Kriteria	Kategori Informan
1.	PPW, S.Tr.Pas	26	Laki-laki	Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan	Pelaku
2.	S, S.H	46	Laki-laki	Kepala Seksi Kegiatan Kerja	Pelaku
3.	MAP, A.md.P., S.H	43	Perempuan	Kepala Seksi Pembinaan Anak Didik	Pelaku
4.	MF, S.H	46	Laki-laki	Kasubsi Bimker dan pengelolaan hasil kerja	Pelaku
5.	BS	53	Laki-laki	Warga Binaan Pemasarakatan	Pengamat
6.	D	35	Laki-laki	Warga Binaan Pemasarakatan	Pengamat
7.	MRS	23	Laki-laki	Warga Binaan Pemasarakatan	Pengamat
8.	E	36	Laki-laki	Warga Binaan Pemasarakatan	Pengamat
9.	S	28	Laki-laki	Mantan Warga Binaan Pemasarakatan	Pengamat
10.	B	36	Laki-laki	Mantan Warga Binaan Pemasarakatan	Pengamat
11.	BMES	51	Laki-laki	Pihak Yayasan Dar El-Iman	Pengamat
12.	A	24	Laki-laki	Pihak KWARCAB Kota Padang	Pengamat
13.	D	33	Perempuan	Keluarga WBP	Pengamat
14.	R	27	Perempuan	Keluarga WBP	Pengamat

Sumber: Data Primer 2024

1.6.3 Data yang Diambil

Penelitian kualitatif mengambil data berupa kata-kata (lisan atau tulisan) dan perbuatan manusia tanpa adanya upaya untuk mengangakakan data yang

didapatkan (Afrizal, 2014). Menurut Sugiyono terdapat 2 jenis data penelitian, yaitu:

1. Data primer: data primer merupakan data yang didapat langsung dari informan melalui wawancara yang mendalam atau bisa disebut *indepth interview*. Data primer diperoleh secara langsung tanpa adanya perantara dari pihak lain. Penelitian ini mengambil data primer melalui hasil wawancara terkait strategi pembinaan yang dilakukan oleh pihak yang terlibat dalam pembinaan terhadap warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Padang.
2. Data sekunder: data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk literatur, dokumen, media massa, atau dari orang lain yang dapat membantu serta mendukung data primer. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang didapat dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Padang mengenai strategi pembinaan terhadap warga binaan di LAPAS tersebut, buku, jurnal, serta media massa yang dapat menjadi acuan dalam proses pengumpulan data.

1.6.4 Teknik dan Proses Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti yang mana tujuannya yaitu untuk mendapatkan data dalam menjawab masalah penelitian. Pada penelitian kualitatif, peneliti menganalisis kata-kata yang menginterpretasikan alasan, makna, kejadian serta perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok sosial. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Wawancara Mendalam (*indepth interview*)

Seorang peneliti melakukan wawancara dengan dasar pertanyaan umum, yang kemudian dibahas dengan lebih rinci selama wawancara atau setelahnya. Dalam wawancara penelitian kualitatif ada beberapa pertanyaan yang sudah disiapkan sebelum wawancara berlangsung atau bisa disebut sebagai pedoman wawancara (Afrizal, 2014). Wawancara yang peneliti gunakan terhadap informan yaitu wawancara mendalam (*indepth interview*). Wawancara mendalam atau *indepth interview* ini merupakan proses penggalian informasi mendalam guna mendapatkan informasi yang terperinci dan terbuka untuk memenuhi tujuan penelitian. Teknik wawancara mendalam tersebut digunakan pada penelitian ini supaya peneliti dapat memperoleh informasi yang mendalam terkait strategi Lembaga Pemasarakatan dalam pembinaan bagi narapidana atau Warga Binaan yang ada di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kota Padang.

Dalam teknik wawancara terdapat tahapan dalam melakukan wawancara yaitu dengan membuat perjanjian dengan informan yang terkait, menentukan waktu wawancara dan membuat pedoman wawancara sebelum melakukan wawancara. Jika pada wawancara pertama dirasa pertanyaan penelitian belum terjawab, maka diperlukan wawancara selanjutnya dengan mengatur kembali jadwal wawancara guna mendapatkan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan penelitian. Teknik wawancara ini bisa menggunakan pedoman wawancara catatan di lapangan, recorder, dan audio hp.

Adapun orang yang diwawancarai dalam penelitian ini yaitu orang yang terlibat langsung dalam pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasarakatan seperti

petugas Lapas yang terlibat dalam pembinaan, Warga Binaan Pemasyarakatan yang masih dalam masa pembinaan, dan Warga Binaan Pemasyarakatan yang sudah habis masa tahanannya. Wawancara dilakukan tentunya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Padang, sedangkan Warga Binaan Pemasyarakatan yang masa tahanannya sudah selesai dilakukan sesuai dengan permintaan informan tersebut.

Sebelum proses penelitian dilakukan, peneliti diharuskan untuk memiliki surat izin penelitian yang sudah disetujui oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat. Pengurusan surat ini dilakukan pada tanggal 26 September 2023 dengan memberikan surat izin penelitian yang dibuat oleh FISIP Universitas Andalas. Setelah menyerahkan surat izin tersebut maka pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Padang melakukan peninjauan dan memproses izin penelitian terlebih dahulu. Pada tanggal 04 Oktober 2023 peneliti dihubungi oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Padang bahwa peneliti sudah diizinkan untuk melakukan penelitian di Lapas tersebut.

Wawancara pertama dilakukan pada tanggal 26 Februari 2024 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Padang. Peneliti memulai penelitian dengan mewawancarai informan secara mendalam. Pada wawancara pertama peneliti diarahkan oleh petugas untuk mewawancarai Warga Binaan Pemasyarakatan yang masih dalam masa tahanan terlebih dahulu, hal ini disebabkan oleh pada hari itu petugas Lapas banyak yang sedang tidak ada di kantor karena sedang melakukan dinas keluar. Wawancara ini tentunya dilakukan atas persetujuan dari para Warga Binaan Pemasyarakatan. Ketika mereka bersedia meluangkan waktunya untuk

diwawancara maka petugas Lapas memberi ruang untuk peneliti dan Warga Binaan Pemasyarakatan dapat melakukan proses wawancara. Setelah itu peneliti melakukan pendekatan dengan Warga Binaan Pemasyarakatan dengan memperkenalkan diri dan menyampaikan tujuan dari wawancara tersebut. Selanjutnya peneliti mewawancarai terkait bagaimana proses pembinaan yang berlangsung di Lapas, mereka juga menjelaskan bagaimana kegiatan yang dilakukan dan menceritakan bagaimana program-program yang disediakan Lapas dapat berpengaruh baik dari pembinaan kepribadian maupun kemandirian. Peneliti melakukan wawancara terhadap empat Warga Binaan Pemasyarakatan yang mengikuti pembinaan di bidang yang berbeda yaitu dengan Bapak BS, Bapak D, saudara MRS, dan Bapak E. Wawancara tersebut dilakukan satu persatu di ruangan registrasi bimbingan kemasyarakatan. Wawancara dilakukan mulai pukul 09.00-14.30 WIB.

Selanjutnya pada tanggal 07 Maret 2024 peneliti kembali melakukan wawancara dengan beberapa petugas Lapas, peneliti diarahkan oleh salah satu petugas bagian Tata Usaha yaitu Ibu Ona untuk melakukan wawancara terhadap petugas Lapas. Pertama peneliti mewawancarai Bapak PPW selaku KASUBSI BIMKEMASWAT. Bapak PPW menjelaskan tentang program serta apa saja strategi yang dilakukan Lapas dalam pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di bidang kepribadian. Masih dihari yang sama, peneliti juga mewawancarai Bapak S selaku KASI GIATJA, Bapak S juga menjelaskan tentang bagaimana program pembinaan di bidang kemandirian berlangsung beserta strategi yang dijalani oleh pihak Lapas. Keesokan harinya peneliti kembali melakukan wawancara dengan Ibu MAP selaku

KASI BINADIK, Ibu MAP menjelaskan program serta strategi Lapas secara keseluruhan baik di bidang kepribadian maupun kemandirian. Lalu pada tanggal 11 Maret 2024 peneliti kembali melakukan wawancara kepada Bapak MF selaku petugas pemasyarakatan bagian bimbingan kerja dan pengelolaan hasil kerja,

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara terhadap mantan Warga Binaan Pemasyarakatan *by phone*. Hal tersebut disebabkan oleh para mantan Warga Binaan Pemasyarakatan sedang tidak ada di kota Padang. Peneliti melakukan wawancara terhadap dua mantan Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu saudara S (inisial) pada tanggal 09 Maret 2024 dan Bapak B (inisial) yang dilakukan pada tanggal 16 Maret 2024. Mereka menjelaskan tentang pengalamannya selama berada di Lapas dan menjelaskan tentang bagaimana pembinaan yang dilakukan ketika berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Padang.

Peneliti juga mewawancarai pihak ketiga yang bekerja sama dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Padang. Pada tanggal 29 Mei 2024 peneliti mewawancarai BMES selaku Buya dari Yayasan Dar El-Iman yang pada hari itu sedang memberikan materi kepada WBP. Pada hari yang sama peneliti juga mewawancarai keluarga dari WBP yaitu Ibu D, ia menjelaskan tentang bagaimana peran Lapas dalam menjaga hubungan antara keluarga dengan WBP. Keesokan harinya peneliti mewawancarai kembali keluarga dari WBP yaitu Ibu R yang merupakan adik dari WBP. Terakhir, pada tanggal 30 Mei 2024 peneliti mewawancarai pihak ketiga yang bekerja sama dengan Lapas yaitu pelatih program pramuka dari KWARCAB Kota Padang, saudara A menjelaskan mengenai

bagaimana kontribusi KWARCAB Kota Padang selama melakukan pelatihan kepada para WBP dalam kegiatan kepramukaan.

Kendala yang peneliti dapati ketika melakukan wawancara ini yang pertama yaitu waktu, hal ini disebabkan oleh beberapa petugas yang sedang melakukan tugas nya sehingga peneliti harus benar-benar menunggu petugas tersebut memiliki waktu luang. Begitupun kepada Warga Binaan Pemasyarakatan yang juga sudah memiliki jadwal kegiatan pembinaan di Lapas. Kendala selanjutnya yaitu Bahasa, terdapat beberapa Warga Binaan Pemasyarakatan yang tidak fasih dalam berbahasa Indonesia, sedangkan peneliti juga tidak begitu fasih dalam Bahasa Minangkabau.

2. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati langsung apa yang terjadi di lapangan. Dalam teknik observasi peneliti perlu melihat, mendengar, dan merasakan sendiri apa yang sedang terjadi atau sedang dilakukan (Afrizal, 2014). Pada penelitian ini peneliti turun langsung ke lapangan untuk memperoleh data dengan cara mengamati setiap kegiatan yang dilakukan oleh informan. Observasi yang dilakukan pada penelitian ini yaitu dengan mengamati bagaimana keadaan situasi dan kondisi yang ada di dalam Lapas Kelas IIA Kota Padang, aktivitas maupun kegiatan apa saja yang dilakukan didalam Lapas, sejauh mana program pembinaan berpengaruh terhadap perilaku Warga Binaan Pemasyarakatan.

Observasi dimulai pada tanggal 09 Oktober 2023 peneliti melakukan observasi awal dengan melihat bagaimana kondisi Lapas, peneliti didampingi langsung oleh petugas pemasyarakatan untuk keliling Lapas, melihat sarana dan

prasarana yang ada di Lapas, dan melihat bagaimana kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh Warga Binaan. Terlihat bahwa setiap Warga Binaan Pemasyarakatan selalu memiliki kegiatan seperti bersih-bersih kamar hunian, bermain bola, tadarus di masjid, dan melakukan kegiatan pembinaan kemandirian. Kebetulan pada tanggal 09 Oktober 2023 sedang ada kunjungan kerabat para Warga Binaan untuk menjenguk Warga Binaan. Kegiatan observasi yang peneliti lakukan tentunya atas izin petugas dan dilakukan pada jam kerja.

Pada tanggal 26 Februari 2024 peneliti mengobservasi beberapa kegiatan yaitu kegiatan santri madani seperti para Warga Binaan melakukan kegiatan membaca Al-Quran pada pukul 10.00 WIB. Selanjutnya kegiatan shalat berjamaah pada waktu dzuhur, Warga Binaan sudah secara sadar langsung datang ke masjid pada saat adzan berkumandang. Peneliti juga melihat langsung kegiatan pada program rehabilitasi medis dan sosial yaitu kegiatan *morning meeting* yang dilakukan setiap pagi. Pada kegiatan *morning meeting* ini peneliti melihat bagaimana Warga Binaan dapat menceritakan keluh kesah nya dengan membentuk sebuah lingkaran dan dibimbing langsung oleh petugas pemasyarakatan. Selain itu peneliti juga melihat langsung bagaimana kegiatan kemandirian berlangsung, seperti proses pembuatan sandal hotel, pembuatan *bakery*, dan pertukangan kayu. Pada pembuatan sandal hotel terdapat 22 pekerja yang setiap Warga Binaan memiliki bagian kerjanya masing-masing seperti pemotongan bahan sandal, pengeleman sandal, dan pengemasan sandal. Peneliti juga diberi kesempatan untuk mencoba hasil *bakery* yang dibuat oleh para Warga Binaan. Pada program *bakery* ini setiap masuk jam kerja sebelum masuk dapur para Warga Binaan di cek

kebersihan nya terlebih dahulu oleh petugas pemasyarakatan, karena pada program *bakery* kehipenisan makanan harus terjaga.

Pada tanggal 07 Maret 2024 peneliti datang kembali ke Lapas, peneliti melihat kegiatan kepramukaan berlangsung. Pada kegiatan pramuka ini diawasi dan dilatih langsung oleh KWARCAB Kota Padang. Kegiatan pramuka ini di ikuti oleh 40 Warga Binaan yang sudah diseleksi oleh pihak Lapas. Dalam kegiatan kepramukaan ini kegiatan yang dilakukan seperti pelatihan baris berbaris, kegiatan fisik, dan terdapat penyuluhan tentang bela negara.

Selain mengobservasi kegiatan pembinaan, peneliti juga melihat interaksi antara petugas pemasyarakatan dengan Warga Binaan. Interaksi yang terjadi antara petugas dengan Warga Binaan sangat baik, di mana pada saat peneliti melakukan penelitian terlihat para petugas yang selalu memotivasi para Warga Binaan untuk tetap semangat dalam mengikuti kegiatan pembinaan. Peneliti juga melihat petugas pemasyarakatan selalu meluangkan waktu nya untuk mendengarkan cerita para Warga Binaan. Petugas pemasyarakatan tidak membatasi dan tidak membedakan Warga Binaan selama di dalam Lapas.

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan terlihat bahwa kegiatan pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Padang ini sudah berjalan secara efektif. Warga Binaan juga terlihat antusias dalam mengikuti program pembinaan, mereka sudah secara sadar mengikuti program yang ada disebabkan oleh dalam program yang mereka ikuti terdapat penilaian yang dinilai langsung oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan, di mana penilaian tersebut akan berpengaruh kepada kesempatan Pembebasan Bersyarat para Warga Binaan.

3. Pengumpulan Dokumen

Pengumpulan dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan tertulis seperti notulen, berita di media massa, surat-surat, dan laporan-laporan terkait untuk mendapatkan informasi yang diperlukan (Afrizal, 2014). Untuk mengecek kebenaran informasi yang didapat, peneliti juga harus mengecek kebenarannya dengan melakukan wawancara mendalam. Dokumen-dokumen yang didapatkan dalam penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk mencocokkan informasi yang ada di lapangan. Dokumen yang didapatkan dalam penelitian ini seperti laporan wawancara, data-data terkait jumlah Warga Binaan, foto, dan lain sebagainya.

1.6.5 Unit Analisis

Penelitian kualitatif memerlukan unit analisis data untuk memfokuskan kajian pada penelitian dan untuk menentukan kriteria objek yang diteliti. Unit analisis menentukan apa, siapa, dan tentang apa proses pengumpulan data. Unit analisis sendiri dapat berupa individu, masyarakat, dan lembaga (perusahaan, organisasi, komunitas, institusi). Unit analisis diperlukan oleh peneliti supaya validitas dan reliabilitas penelitian dapat terjaga. Pada penelitian ini yang menjadi unit analisis yaitu Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Padang yang merupakan institusi pemerintahan.

1.6.6 Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses pengolahan data mentah yang dilakukan dengan sistematis. Analisis data memungkinkan peneliti dalam menemukan hal-hal yang sesuai dengan persoalan yang sedang diteliti. Analisis

data dalam penelitian kualitatif dilakukan untuk menentukan bagian-bagian yang saling berkaitan antara satu bagian dengan keseluruhan data yang dikumpulkan dan nantinya menghasilkan klasifikasi atau bisa disebut juga dengan tipologi (Afrizal, 2014). Miles dan Huberman membagi analisis data kedalam tiga tahap, yaitu:

1. Kodifikasi Data

Peneliti menulis kembali catatan yang sudah didapatkan di lapangan ketika melakukan wawancara terhadap informan. Selanjutnya catatan tersebut diberi kode atau tanda pada informasi yang dianggap penting, sehingga peneliti dapat menemukan mana informasi yang penting mana yang tidak. Informasi penting sendiri merupakan informasi yang berkaitan dengan topik penelitian, sedangkan informasi yang tidak penting yaitu informasi yang tidak berkaitan dengan topik penelitian (Afrizal, 2014).

2. Tahap Penyajian Data

Merupakan tahap lanjutan analisis yang mana peneliti menyajikan temuan penelitian yang berupa kategori atau pengelompokan. Dalam hal ini Miles dan Huberman menyarankan untuk menggunakan matrix ataupun diagram untuk menyajikan hasil penelitian supaya hasil penelitian lebih efektif (Afrizal, 2014).

3. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap lanjutan, pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari hasil temuan data. Hal tersebut merupakan interpretasi peneliti atas temuan dari wawancara atau suatu dokumen. Ketika kesimpulan sudah diambil, selanjutnya peneliti mengecek kembali kesahihan

interpretasi dengan cara memeriksa ulang proses koding dan penyajian data untuk memastikan tidak ada kesalahan (Afrizal, 2014).

1.6.7 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu tempat di mana penelitian dilakukan. Lokasi penelitian juga bisa diartikan sebagai konteks atau setting sebuah penelitian. Tempat disini tidak selalu megacu kepada wilayah tetapi juga bisa mengacu pada organisasi, institusi, dan sejenisnya (Afrizal, 2014). Lokasi penelitian ini dilakukan pada Lembaga Pemasarkatan Kelas IIA Kota Padang. Alasannya yaitu Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA dianggap dapat menjawab pertanyaan permasalahan penelitian ini disebabkan oleh Lembaga Pemasarakatan tersebut memiliki potensi yang cukup baik dalam pembinaan terhadap narapidana.

1.6.8 Definisi Operasional Konsep

1. Strategi

Strategi merupakan rencana serta upaya yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu dengan mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan, mengantisipasi masalah, dan mengevaluasi langkah-langkah apa yang nantinya harus diambil. Strategi biasanya melibatkan taktik, perencanaan jangka panjang, dan adaptasi berkelanjutan guna mencapai hasil yang diinginkan dalam berbagai konteks seperti dalam bisnis, militer, pemerintahan, maupun bidang lainnya.

2. Lembaga Pemasarakatan

Lembaga Pemasarakatan merupakan sebuah institusi pemerintah yang dirancang khusus untuk menahan serta mengawasi individu yang telah dijatuhi hukuman oleh sistem peradilan, baik sebagai akibat dari pelanggaran hukum

pidana atau perintah pengadilan. Lembaga Pemasyarakatan memiliki tujuan untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam lingkungan penjara, memberikan rehabilitasi bagi narapidana, dan memberikan perlindungan masyarakat dari seseorang yang dianggap memiliki potensi untuk membahayakan lingkungan sekitarnya.

3. Pembinaan

Pembinaan yaitu serangkaian upaya serta tindakan yang dibuat untuk mengarahkan, membimbing dan mendukung perkembangan seseorang secara positif dalam berbagai aspek di kehidupannya. Pembinaan melibatkan proses yang memberikan arahan, penyuluhan, dan dorongan kepada seorang individu supaya mereka dapat mencapai potensi mereka sebaik mungkin.

4. Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)

Warga Binaan Pemasyarakatan atau WBP merupakan seseorang narapidana yang sudah dijatuhi hukuman penjara atau kini disebut pemasyarakatan oleh sistem peradilan karena sudah terbukti bersalah dalam tindak pidana dan sedang melakukan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

1.6.9 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 5 bulan, mulai dari membuat instrumen penelitian pada bulan Desember 2023 dan diakhiri ujian skripsi pada bulan Mei 2024. Berikut penjabaran jadwal penelitian:

Tabel 1. 4
Jadwal Penelitian

No	Nama Kegiatan	2023-2024					
		Des	Jan	Feb	Maret	April	Mei
1.	Membuat instrumen penelitian, pedoman penelitian						
2.	Penelitian Lapangan						
3.	Analisis data						
4.	Penelitian Laporan dan Bimbingan						
5.	Ujian Skripsi						

